



# RENCANA KERJA (RENJA) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 2024



# PEMERINTAH KOTA BATAM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 2023

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2024 ini.

Renja adalah dokumen perencanaan Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam untuk periode 1 (satu) tahun. Renja memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam, yang disusun berpedoman kepada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam dan RKPD sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja ini dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus pedoman bagi seluruh jajaran pejabat dan staf di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2024.

Semoga Rencana Kerja (Renja) ini dapat dipedomani oleh seluruh pejabat dan staf di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat guna menyukseskan visi dan misi Pemerintah Kota Batam.

Batam, Juli 2023

**Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Kota Batam**



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR GAMBAR .....	iii
DAFTAR TABEL .....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	4
1.3 Maksud dan Tujuan .....	7
1.4 Sistematika Penulisan .....	8
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU .....	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah .....	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	25
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	28
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	34
2.5 Penelaahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	46
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....	47
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	47
3.2 Tujuan, dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .....	49
3.3 Program dan Kegiatan .....	50
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....	66
BAB V PENUTUP .....	75

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah .....	3
Gambar 2	Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya .....	4

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2023.....	11
Tabel 2.2.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam.....	26
Tabel 2.3.	Capaian Kinerja Penyelesaian Gangguan Trantibum, dan Pelanggaran Perda dan Perkada Tahun 2022 .....	28
Tabel 2.3.2.	Identifikasi Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam.....	29
Tabel 2.4.	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kota Batam..	35
Tabel 2.5.	Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kota Batam.....	45
Tabel 3.2.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam.....	49
Tabel 3.3.	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kota Batam.....	53
Tabel 4.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2024.....	65

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

#### 1.1.1 Pengertian Renja Perangkat Daerah

Pembangunan daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Agar pembangunan daerah lebih terarah dan terukur maka diperlukan perencanaan. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah dengan prinsip-prinsip, meliputi:

- a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah; dan
- d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana Perangkat Daerah. Rencana pembangunan daerah terdiri atas RPJPD, RPJMD, dan RKPD sedangkan Rencana Perangkat Daerah terdiri atas Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1

(satu) tahun yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.

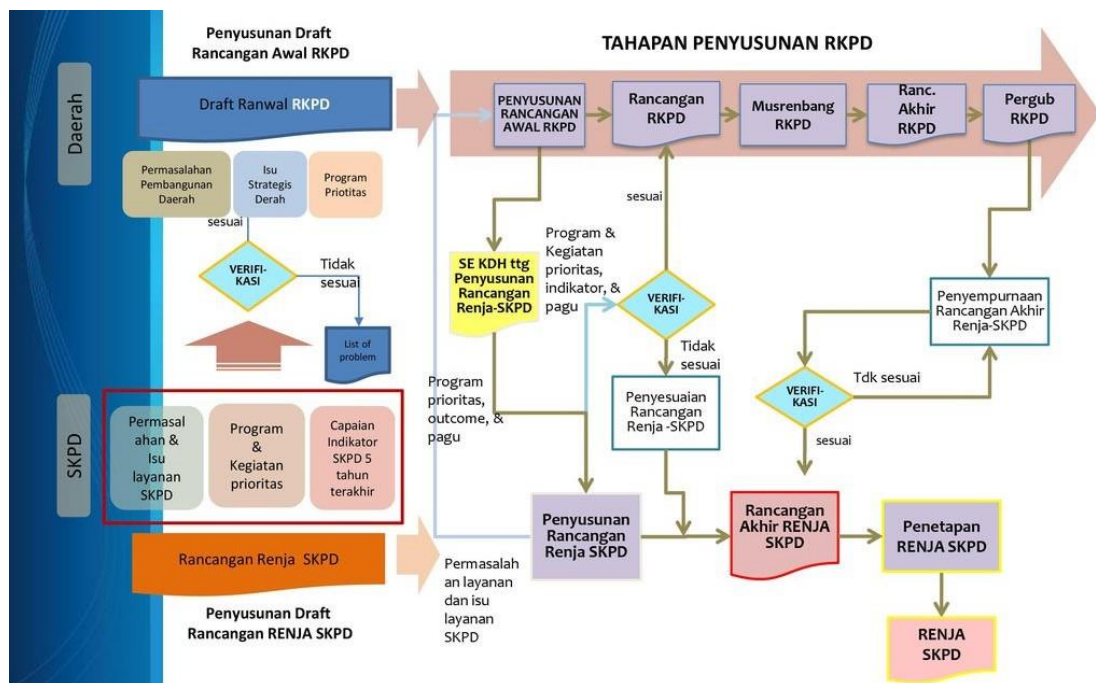
#### 1.1.2 Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Penyusunan Renja Perangkat Daerah merupakan wujud pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah dimulai dari persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, penyusunan rancangan akhir, dan penetapan. Penyusunan Renja harus berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Renja Perangkat Daerah memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Program dan kegiatan dimaksud meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju.

Tahapan penyusunan Renja dapat dilihat pada gambar berikut ini:



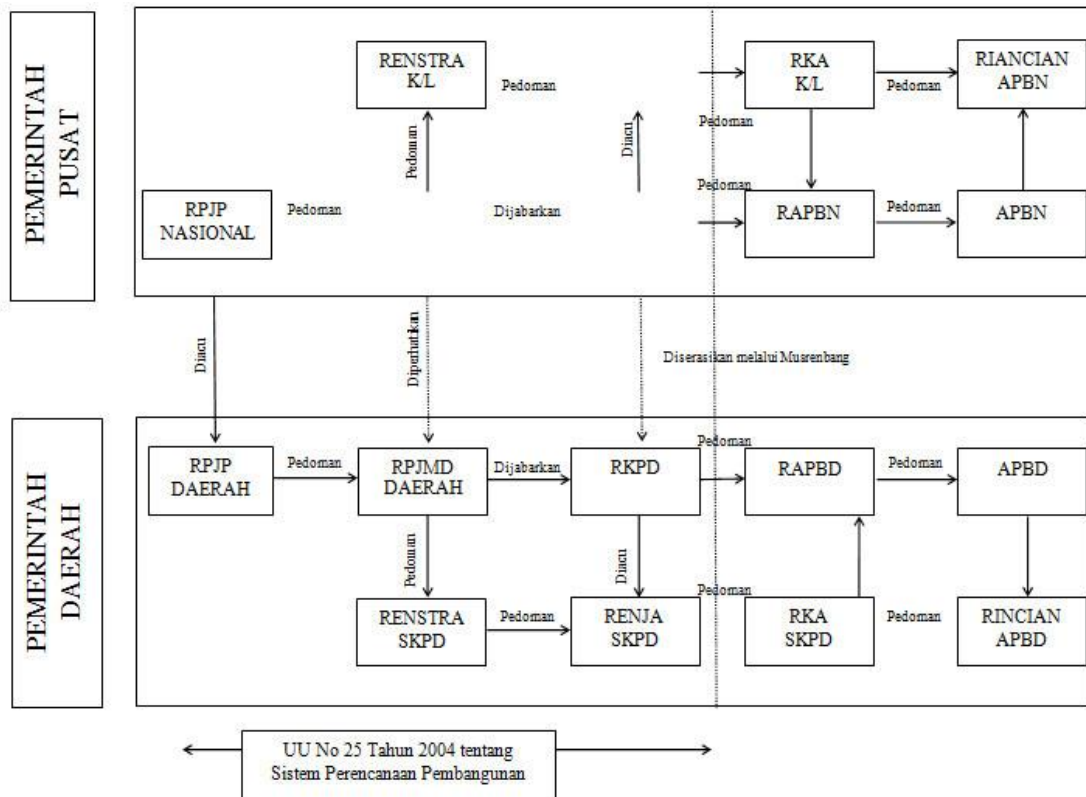
Gambar 1

### Tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah

#### 1.1.3 Keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Renja Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan tahunan harus disusun dengan berpedoman pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan Pemerintah Daerah, dan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang merupakan dokumen perencanaan 5 tahunan daerah. Selanjutnya Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam Menyusun RKA sebelum ditetapkan menjadi APBD.

Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 1

Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- i. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instransi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
- j. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 10);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana

- Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Tahun 2019 Nomor 550);
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  - o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  - p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
  - q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 892);
  - r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  - s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
  - t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ..... Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor .....);
  - u. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  - v. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);
  - w. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan

Riau Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 54);

- x. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2013 Nomor 2);
- y. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 1);
- z. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 3);
- aa. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 127);
- bb. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 78 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 864);
- cc. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 18 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 886).
- dd. Peraturan Walikota Batam Nomor 214 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 1082)
- ee. Peraturan Walikota Batam No 65 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2024

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam adalah untuk memberikan gambaran program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam, yang disusun berpedoman kepada Renstra dan RKPD.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2024 adalah untuk menyingkronkan dan menyinergikan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan daerah (RKPD)

## **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2024 adalah:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Memuat latar belakang, yaitu pengertian Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, proses penyusunan Rencana Kerja (Renja), keterkaitan Rencana Kerja (Renja) dengan dokumen perencanaan lainnya, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

### **BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

Memuat evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 dan capaian Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, review terhadap rancangan awal RKPD, penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, serta program dan kegiatan.

### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Memuat rencana kerja (Renja) dan pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam

### **BAB V PENUTUP**

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada Perubahan Rencana Kerja (Renja) tahun 2022, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam merencanakan 2 (dua) program dan 9 (sembilan) kegiatan, dan 25 (dua puluh lima) sub kegiatan, yaitu:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 1) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah:
    - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
    - b) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.
  - 2) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
    - a) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.
  - 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah:
    - a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
    - b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
    - c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
    - d) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
    - e) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
    - f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
  - 4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
    - a) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:
    - a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
    - b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
  - 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:
    - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;

- b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
  - c) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
  - d) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
- b. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota:
    - a) Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan;
    - b) Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa;
    - c) Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
    - d) Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia;
    - e) Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada.
  2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota:
    - a) Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota
    - b) Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota;
    - c) Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota.
  3. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota:
    - a) Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS.

Program dan kegiatan tersebut diakomodir dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan dengan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang sama sebagaimana tertuang dalam Perubahan Renja.

Berikut ini disajikan evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan pencapaian Renstra:

Tabel 2.1  
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2023  
Kota Batam

Nama Perangkat Daerah: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar									
1.05	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum									
01:05:01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
<b>1.05.01.2.02</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terpenuhi</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	195 Orang/Bulan	207 Orang	197 Orang	194 Orang	100	199 Orang/Bulan	199 Orang/bulan	100
1.05.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	300 Dokumen	22 Dokumen	27 Dokumen	27 Dokumen	100	324 Dokumen	324 Dokumen	100
<b>1.05.01.2.05</b>	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terlaksana</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	100	2 Paket	0	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.05.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%-	100%	100%	100	100%	100%	100
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	1 Paket	100%
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	7 Paket	6 Paket	100	7 Paket	7 Paket	100%
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	4 Paket	3 Paket	3 Paket	100	3 paket	3 paket	100%
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	100	2 Paket	2 Paket	100
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	1 Laporan	13 Laporan	11 Laporan	92,3	4 Laporan	4 Laporan	100
<b>1.05.01.2.07</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpenuhi</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
1.05.01.2.07.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	-	-	-	-	-	-	-
1.05.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket mebel yang Disediakan	5 Paket	3 Paket	-	-	-	4 Paket	-	-
1.05.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	9 Paket	8 Unit	8 Unit	100	40 Unit	11 Unit	100
<b>1.05.01.2.08</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	4 Paket	12 Laporan	12 Laporan	100	48 Laporan	48 Laporan	100
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	442 Orang	12 Laporan	12 Laporan	100	72 Laporan	72 laporan	100
<b>1.05.01.2.09</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terlaksana</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100	4 Unit	2 Unit	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	100	20 Unit	11 Unit	100
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 Unit	47 Unit	35 Unit	32 Unit	100	45 Unit	35 Unit	100
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	3 Unit	1 Unit	1 Unit	100	1 Unit	2 Unit	100
<b>1.05.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>1. Persentase Gangguan Trantibum yang Dapat Diselesaikan</b> <b>2. Persentase Penegakan Perda dan Perkada</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		3. Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Terkena Dampak Gangguan Trantibum Akibat Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Perda dan Perkada								
1.05.02.2.01	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1. Persentase Pelanggaran dan Pengaduan Trantibum yang Ditangani 2. Persentase Satlinmas yang Terlatih dan Dikukuhkan 3. Persentase Polisi Pamongpraja yang Memenuhi Standar	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Kualifikasi								
		4. Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Terkena Dampak Gangguan Trantibum Akibat Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Perda dan Perkada								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	100 Kasus	-	24 Kasus	24 Kasus	100	100 Kasus	100 Kasus	100
1.05.02.2.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	30 Kasus	7 Kasus	21	21	100	37 Kasus	19 Kasus	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.05.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten dan kota	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	6 Dokumen	-	-
1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	26 Orang	-	18 Orang	18 Orang	100 %	35 Orang	30 Orang	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.05.02.2.01.06	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan kejahatan	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
1.05.02.2.01.07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	15 Unit	-	-	-	-	9 Unit	9 Unit	100
1.05.02.2.01.08	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang telah dibuat dan dimutakhirkan	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.02.2.01.09	Penyediaan Layanan Dalam Rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1 Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	100	1 laporan	1 Laporan	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.05.02.2.02	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Pelanggaran Perda yang Ditindaklanjuti	100%	-	100%	100%	100	100%	100%	100
1.05.02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	-	-
1.05.02.2.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	30 Laporan	87 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	100%	34 Laporan	22 laporan	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.05.02.2.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	6 Laporan	6 Laporan	9 Laporan	9 Laporan	100%	6 Laporan	6 Laporan	100
1.05.02.2.03	Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Rasio PPNS Satpol PP	100%	3,40%	4,37%	4,37%	100%	5,34%	5,34%	100
1.05.02.2.03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	3 Laporan	-	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	1 Laporan	100

Dari pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun 2022, ada program, kegiatan, dan sub kegiatan yang memenuhi target kinerja dan melebihi target kinerja yang telah direncanakan dalam Renja Tahun 2022 dan Renstra dengan rincian sebagai berikut:

a. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang memenuhi target kinerja Renja Tahun 2022:

- 1) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan realisasi 100%, sehingga tingkat capaian kinerja Renja dan Renstra juga 100%;
- 2) Kegiatan Administrasi Kepegawaian, dengan realisasi 100%, sehingga tingkat capaian kinerja Renja dan Renstra juga 100%;
- 3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan realisasi 100%, sehingga tingkat capaian kinerja Renja dan Renstra juga 100%;
- 4) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan realisasi 100%, sehingga tingkat capaian kinerja Renja dan Renstra juga 100%;
- 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan realisasi 100%, sehingga tingkat capaian kinerja Renja dan Renstra juga 100%;
- 6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan realisasi 100%, sehingga tingkat capaian kinerja Renja dan Renstra juga 100%;

b. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja Renja Tahun 2022:

- 1) Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Kabupaten Kota, pada Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa, di mana selama tahun 2022, aksi unjuk rasa yang ditangani sebanyak 53 unjuk rasa, sedangkan target Renja sebanyak 15 unjuk rasa.

Banyaknya aksi unjuk rasa yang ditangani disebabkan banyaknya penolakan terhadap UU Cipta Lapangan Kerja (Omnibus Law), dan tuntutan dan penolakan terhadap UMK Batam tahun 2023.

- 2) Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Walikota, pada Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota,

di mana selama tahun tahun 2022 terdapat 20 Laporan Pengawasan, sedangkan target Renja sebanyak 12 Laporan, dengan tingkat capaian sebesar 166%

Secara umum pelaksanaan program/kegiatan tahun 2022 telah memenuhi target kinerja Perubahan Renja 2022 dan Renstra, meskipun ada kegiatan yang tidak dilaksanakan akibat rasionalisasi. Oleh karena itu ke depan diperlukan dukungan anggaran dari Pemerintah Kota Batam melalui TAPD dalam memberikan pagu anggaran yang cukup kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam agar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dapat memenuhi target kinerja Renja maupun Renstra.

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Untuk melaksanakan urusan wajib bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dalam Renstra Tahun 2021-2026 Satuan Polisi Pamong Praja merencanakan 2 (dua program) yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota, dan Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Berikut ini adalah pencapaian kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam tahun 2022:

Tabel 2.2  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah  
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam

No	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 n-1	Tahun 2024 (n)	Tahun 2025 (n+1)	Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 n-1	Tahun 2024 (n)	Tahun 2025 (n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah			100%	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	
2	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan		Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100 %	100 %	
3	Persentase Penegakan Perda dan Perkada		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Persentase warga Negara yang memperoleh	Jumlah Warga Negara yang memperoleh		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

No	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 n-1	Tahun 2024 (n)	Tahun 2025 (n+1)	Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 n-1	Tahun 2024 (n)	Tahun 2025 (n+1)	
	layanan terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten/Kota										

Dari tabel capaian kinerja yang disajikan di atas, dapat dilihat bahwa realisasi dari semua indikator kinerja mencapai 100%. Dengan demikian capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam tahun 2022 sangat baik.

## 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

### 2.3.1 Tingkat Kinerja Perangkat Daerah

Dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam 2021-2026, indikator kinerja program yang ditetapkan adalah:

- 1) Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan, dengan rumus perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah gangguan Trantibum yang diselesaikan}}{\text{Jumlah gangguan Trantibum yang dilaporkan Masyarakat dan teridentifikasi oleh Satpol PP}} \times 100\%$$

- 2) Persentase Penegakan Perda dan Perkada, dengan rumus perhitungan :

$$\frac{\text{Jumlah Pelanggaran Perda dan Perkada yang diselesaikan}}{\text{Jumlah pelanggaran Perda dan perkada yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh Satpol PP}} \times 100\%$$

- 3) Persentase warga negara yang memperoleh layanan terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada dengan rumus perhitungan :

$$\frac{\text{Jumlah warga negara yang memperoleh layanan terkena dampak akibat penegakan Perda dan Perkada}}{\text{Jumlah warga negara yang terkena dampak akibat penegakan Perda dan Perkada}} \times 100\%$$

Capaian kinerja penyelesaian gangguan Trantibum, penegakan Perda dan Perkada, dan layanan terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3

Capaian Kinerja Penyelesaian Gangguan Trantibum, dan Pelanggaran Perda dan Perkada Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Target	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus yang Selesai	Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	618	618	100%
2	Persentase penegakan Perda dan Perkada	100%	853	853	100%
3	Persentase warga negara yang memperoleh layanan terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran	100%	4	4	100%

No	Indikator Kinerja	Target	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus yang Selesai	Realisasi
1	2	3	4	5	6
	Perda dan Perkada				

### 2.3.2. Permasalahan dan Hambatan

Dalam 5 (lima) tahun terakhir, Pemerintah Kota Batam sedang giatnya melakukan pembangunan infrastruktur khususnya jalan seluruh wilayah Kota Batam dalam upaya untuk mendukung pengembangan pariwisata. Namun banyaknya lahan yang dikuasai oleh masyarakat tanpa dokumen yang legal serta tidak sesuai dengan rencana tata ruang telah menimbulkan gangguan ketentraman, ketertiban dan keindahan bagi Kota Batam.

Sebagai Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tentu saja ditemukan masalah-masalah yang dapat menghambat pencapaian kinerja. Beberapa permasalahan umum yang dapat diidentifikasi oleh Satpol PP Kota Batam terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.3.2**  
**Identifikasi Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Masih tingginya pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum	1. Pemahaman masyarakat terhadap peraturan-peraturan daerah masih kurang 2. Kesulitan ekonomi dan kesejahteraan sosial terutama dampak pandemi Covid-19
2	Masih tingginya pelanggaran terhadap peraturan daerah	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum Penegakan terhadap pelanggaran peraturan daerah masih kurang	1. Pemahaman masyarakat terhadap peraturan-peraturan daerah masih kurang 2. Kesulitan ekonomi dan kesejahteraan sosial terutama dampak pandemi Covid-19

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
3	Gangguan ketentraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat tinggi	Penerapan sistem keamanan lingkungan masih kurang	Jumlah Linmas masih sedikit dan kurang diberdayakan
4	Belum maksimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja	1. Kualitas SDM aparatur masih kurang 2. Sarana dan prasarana masih terbatas	Alokasi anggaran pengembangan SDM dan peningkatan sarana dan prasarana terbatas

Sumber: Hasil analisis

Permasalahan umum Kota Batam adalah tingginya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat terhadap peraturan perundangan, dan untuk urusan Trantibum, gangguan dan pelanggaran Trantibum dan Perda juga cukup tinggi. Pelanggaran-pelanggaran itu disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat untuk menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang ada di Kota Batam. Tingginya gangguan dan pelanggaran Trantibum dan Perda berakar dari rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang berlaku di Kota Batam. Selain itu kualitas SDM aparatur juga berperan terhadap penegakan gangguan dan Pelanggaran Trantibum dan Perda/Perkada.

Dalam hal perlindungan masyarakat, jumlah satlinmas yang ada saat ini belum terpenuhi secara maksimal sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat. Oleh karena itu, menindaklanjuti hal tersebut, pada bulan September 2022 Satpol PP Kota Batam telah membuat terobosan dengan membentuk Praja Pembina Perlindungan Masyarakat (Prabinmas) dengan program 1 anggota Satpol PP ditempatkan di 1 kelurahan yang bertugas sebagai pembina petugas/anggota linmas yang ada di wilayah kelurahan terkait dan bersinergi dengan Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat meminimalisir kekurangan petugas linmas di kelurahan.

### 2.3.3 Peluang dan Tantangan

Sejak pertama kali dikembangkan menjadi Kota industri, perdagangan, jasa dan alih kapal pada awal tahun 1970an, Kota Batam telah mengalami banyak kemajuan. Pengembangan Kota Batam oleh Pemerintah Pusat tak terlepas dari letak Kota Batam yang berbatasan langsung dengan dua negara tetangga dan daerah-daerah yang menjadi lalu lintas perdagangan internasional, hal ini tentu

berimplikasi positif pada posisi geostrategik Kota Batam. Dalam perspektif ekonomi, wilayah Kota Batam menjadi daya tarik bagi negara tetangga untuk berinvestasi dan merelokasi aktivitas ekonomi mereka ke Batam, mulai dari aktivitas industri, perdagangan maupun jasa.

Pengembangan dan kemajuan Kota Batam juga menjadi daya tarik bagi pendatang dari berbagai daerah sehingga menjadikan kota ini kota yang heterogen dengan multikultur dan menjadi miniatur Indonesia karena hampir semua etnis dan agama terdapat di kota ini yang berdampak kepada meningkatnya jumlah penduduk.

Kondisi ini selain berdampak positif yaitu menambah khasanah kekayaan budaya juga dapat menimbulkan dampak negatif berupa gangguan terhadap keamanan, ketentraman dan ketertiban umum. Jumlah penduduk yang banyak dan heterogen sangat rawan menimbulkan konflik sosial di masyarakat.

Selain itu, pandemi Covid-19 yang menyerang dunia tak terkecuali Indonesia dan Kota Batam sejak tahun awal tahun 2020 telah menimbulkan dampak yang sangat besar bagi berbagai sektor terutama kesehatan dan ekonomi yang menyebabkan rendahnya sentimen investor terhadap pasar yang akhirnya membuat pasar ke arah negatif dan membuat pertumbuhan ekonomi melambat. Hal tersebut dipicu dengan adanya kebijakan pembatasan sosial dan karantina wilayah sehingga aktivitas ekonomi menjadi terhambat dan banyak masyarakat yang terpaksa dirumahkan dan mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), serta usah yang dijalankan mengalami penurunan pendapatan bahkan mengalami kebangkrutan. Keadaan ini membuat masyarakat melakukan berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya salah satunya menjadi pedagang kreatif lapangan (PKL) yang meliputi trotoar dan bahu jalan. Hal ini berdampak pada meningkatnya gangguan trantibum karena usaha yang di jalankan di trotoar dan bahu jalan tersebut mengganggu lalu lintas di ruas jalan.

Hal ini menjadi tantangan sendiri bagi satpol pp dalam penegakan perda dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kota batam.

#### 2.3.4 Isu-Isu Strategis Pelayanan Perangkat Daerah

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Isu-isu strategis harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Beberapa isu strategis Kota Batam yang tertuang dalam Rencana Strategis RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026 adalah:

- a. Adaptasi terhadap Normal Baru pasca wabah Covid-19
- b. Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing;
- c. Reformasi Birokrasi;
- d. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
- e. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
- f. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
- g. Mewujudkan Batam sebagai Bandar Berstandar Internasional;
- h. Menciptakan Batam sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional;
- i. Pembangunan gender dan pemberdayaan kelompok difabel dan kelompok rentan;
- j. Peluang Pembiayaan Pembangunan Non APBD.

Dari 10 (sepuluh) isu strategis Kota Batam di atas, akan dipilih isu-isu strategis Kota Batam yang relevan dan penting bagi Satpol PP. Isu-isu strategis Kota Batam yang relevan dan penting bagi Satpol PP dalam penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah:

- a. Mengembangkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing

Salah satu mutu pelayanan dasar sub urusan trantibum adalah standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat. Peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan Linmas perlu dilakukan untuk mengembangkan kompetensi dan keahlian agar cakap dalam menghadapi, menangani dan menyelesaikan pelanggaran Perda dan Perkada serta gangguan Trantibum. Dalam hal perlindungan masyarakat (linmas) telah dibentuk Praja Pembina Perlindungan Masyarakat

(Prabinmas) dengan program 1 orang anggota Satpol PP ditempatkan untuk 1 kelurahan yang ada di Kota Batam.

- b. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.

Dalam 5 (lima) tahun terakhir, Pemerintah Kota Batam sedang giatnya melakukan pembangunan infrastruktur khususnya jalan seluruh wilayah Kota Batam dalam upaya untuk mendukung pengembangan pariwisata. Namun banyaknya lahan yang dikuasai oleh masyarakat tanpa dokumen yang legal serta tidak sesuai dengan rencana tata ruang telah menimbulkan gangguan ketentraman, ketertiban dan keindahan Kota Batam.

Oleh karena itu penataan bahu jalan guna mendukung peningkatan infrastruktur pada jalan-jalan utama dan penertiban Kawasan-kawasan yang tidak sesuai dengan peruntukan terus dilakukan oleh Satpol PP bersama tim terpadu.

- c. Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi ditunjukkan untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih murah, lebih mudah dan lebih baik harus selalu diupayakan dan diwujudkan oleh Pemerintah Kota Batam. Isu reformasi birokrasi selalu relevan dalam upaya meningkatkan profesionalitas pemerintah daerah, pola pelaksanaan reformasi birokrasi bersifat iteratif yang terus menyesuaikan dengan dinamika tuntutan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah yang lebih baik.

Sebagai pemangku urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, Satpol PP harus dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku dan kode etik yang telah ditetapkan.

- d. Adaptasi terhadap Normal Baru pasca wabah Covid-19

Merebaknya pandemi Covid-19 beserta penanganannya menimbulkan protokol kesehatan baru yang perlu dipatuhi oleh seluruh elemen masyarakat serta menimbulkan kebiasaan-kebiasaan baru yang sering disebut dengan normal baru. Era dimana kebiasaan-kebiasaan baru tersebut menjadi normal disebut dengan era normal baru. Pada era tersebut, kebiasaan baru tidak hanya timbul pada aktivitas masyarakat sehari-hari termasuk dalam sektor bisnis dan pemerintahan. Normal baru akan mendorong berubahnya cara berkomunikasi, interaksi, dan menjalankan bisnis bagi sebagian besar masyarakat.

Dalam rangka pencegahan Covid-19 dan adaptasi terhadap kehidupan normal baru, Pemerintah Kota Batam mengeluarkan Peraturan Walikota Batam (Perwako) Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kota Batam. Satpol PP sebagai Perangkat Daerah Kota Batam yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat mempunyai peran yang sangat besar dan menjadi garda terdepan dalam Penegakan Protokol Kesehatan Covid-19 sebagaimana diatur dalam Perda tersebut.

#### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Tabel Tabel 2.4

## Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

## Kota Batam

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Batam	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	50.021.217.091	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Batam	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	50.021.217.091	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Batam	Persentase administrasi keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	29.306.301.621	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Batam	Persentase administrasi keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	29.220.868.111	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Batam	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	212 orang /bulan	29.242.641.621	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Batam	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	189 orang /bulan	29.160.208.111	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Batam	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	276 Dokumen	63.660.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Batam	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	324 Dokumen	60.660.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Batam	Persentase administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	100%	151.810.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Batam	Persentase administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	100%	1.344.089.000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Batam	Jumlah Paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	2 Paket	151.810.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Batam	Jumlah Paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	2 Paket	1.344.089.000	
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Batam</b>	<b>Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>100%</b>	<b>812.896.430</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Batam</b>	<b>Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>100%</b>	<b>760.099.000</b>	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Batam	Jumlah paket Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	9 Paket	6.931.750	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Batam	Jumlah paket Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	17.055.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Batam	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	7 Paket	185.277.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Batam	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	7 Paket	256.006.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Batam	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	3 Paket	362.518.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Batam	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	3 Paket	269.088.000	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Batam	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	9 Paket	51.272.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Batam	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	3 Paket	46.194.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Batam	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	4 Dokumen	7.447.680	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Batam	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 Dokumen	7.200.000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Batam	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	4 Laporan	199.450.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Batam	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang dilaksanakan	4 Laporan	164.556.000	
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kota Batam</b>	<b>Persentase kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi</b>	<b>100 %</b>	<b>575.290.500</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kota Batam</b>	<b>Persentase kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi</b>	<b>100 %</b>	<b>744.905.000</b>	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Batam	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Disediakan	-	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Batam	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	-	-	
Pengadaan Mebel	Kota Batam	Jumlah paket mebel yang disediakan	5 Paket	143.823.000	Pengadaan Mebel	Kota Batam	Jumlah paket mebel yang disediakan	4 Paket	214.090.000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Batam	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	30 Unit	431.467.500	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Batam	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	68 Unit	530.815.000	
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kota Batam</b>	<b>Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi</b>	<b>100%</b>	<b>18.634.771.840</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kota Batam</b>	<b>Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi</b>	<b>100%</b>	<b>18.452.836.172</b>	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Batam	Jumlah laporan penyediaan jasa, komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	38 Laporan	219.600.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Batam	Jumlah laporan penyediaan jasa, komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	37 Laporan	203.160.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Batam	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum Kantor yang disediakan	72 Laporan	18.415.171.840	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Batam	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum Kantor yang disediakan	72 Laporan	18.249.676.172	
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kota Batam</b>	<b>Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terlaksana</b>	<b>100%</b>	<b>540.146.700</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kota Batam</b>	<b>Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terlaksana</b>	<b>100%</b>	<b>424.172.500</b>	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Batam	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	2 Unit	80.760.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Batam	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	2 Unit	80.760.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Batam	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara, dan dibayarkan pajak dan perizinannya	15 Unit	276.008.700	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Batam	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara, dan dibayarkan pajak dan perizinannya	11 Unit	139.270.000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Batam	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	30 Unit	25.770.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Batam	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	77 Unit	50.370.000	
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Batam	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	3 Unit	157.608.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Batam	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	2 Unit	153.772.500	
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kota Batam	1. Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan 2. Persentase penegakan Perda dan Perkada 3. Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran perda dan perkada	100% 100% 100%	4.180.559.692	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kota Batam	1. Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan 2. Persentase penegakan Perda dan Perkada 3. Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran perda dan perkada	100% 100% 100%	3.254.607.000	
Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Batam	1. Persentase pelanggaran dan pengaduan trantibum yang ditangani	100%	3.132.848.312	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Batam	1. Persentase pelanggaran dan pengaduan trantibum yang ditangani	100%	2.432.251.000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
		2. Persentase Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	100%				2. Persentase Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	100%		
		3. Persentase Polisi Pamong Praja yang memenuhi standar kualifikasi	100%				3. Persentase Polisi Pamong Praja yang memenuhi standar kualifikasi	75%		
		4. Persentase warga negara yang memperoleh layanan terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran perda dan perkada	100%				4. Persentase warga negara yang memperoleh layanan terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran perda dan perkada	100%		
		5. Persentase jenis sarpras trantibum yang terpenuhi sesuai kebutuhan	100%				5. Persentase jenis sarpras trantibum yang terpenuhi sesuai kebutuhan	100%		

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui deteksi dini dan cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksaaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kota Batam	Jumlah Kasus gangguan Ketentraman dan Ketertiban umum yang dicegah melalui deteksi dini, pembinaan dan penyuluhan, Pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan	100 Kasus	158.105.052	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui deteksi dini dan cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksaaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kota Batam	Jumlah Laporan gangguan Ketentraman dan Ketertiban umum yang dicegah melalui deteksi dini, pembinaan dan penyuluhan, patroli, pengamanan dan pengawalan	100 Laporan	410.465.000	
Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kota Batam	Jumlah Kasus gangguan Ketentraman dan Ketertiban umum berdasarkan perda dan perkara melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa yang dilakukan penindakan	50 Kasus	961.856.566	Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kota Batam	Jumlah Laporan gangguan Ketentraman dan Ketertiban umum berdasarkan perda dan perkara melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa yang dilakukan penindakan	54 Laporan	1.202.750.000	
Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta	Kota Batam	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan	1 Dokumen	50.000.000	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta	Kota Batam	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan	-	-	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota		Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota			Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota		Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota			
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kota Batam	Jumlah dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan ketertiban umum	1 Dokumen	143.390.729	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kota Batam	Jumlah dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan ketertiban umum	5 Dokumen	194.252.000	
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuasa Hak Asasi Manusia	Kota Batam	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat dan ditingkatkan kapasitasnya	25 Orang 58 orang	271.707.292	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuasa Hak Asasi Manusia	Kota Batam	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat dan ditingkatkan kapasitasnya	42 Orang	232.574.000	
Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kota Batam	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1 Dokumen	50.000.000	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kota Batam	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	-	-	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kota Batam	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	10 Unit	1.397.788.673	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kota Batam	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	9 Unit	342.210.000	
Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Kota Batam	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	17 dokumen	50.000.000	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Kota Batam	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	-	-	
Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Kota Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani.	2 laporan	50.000.000	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kota Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani. Jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani.	4 laporan	50.000.000	
<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota</b>	<b>Kota Batam</b>	<b>Persentase pelanggaran Perda yang ditindaklanjuti</b>	<b>100%</b>	<b>928.543.380</b>	<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota</b>	<b>Kota Batam</b>	<b>Persentase pelanggaran Perda yang ditindaklanjuti</b>	<b>100%</b>	<b>726.946.000</b>	
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Kota Batam	Jumlah laporan hasil pelaksanaan sosialisasi penegakan perda/perkada kepada masyarakat/kelompok masyarakat/pelaku usaha	12 laporan	66.480.000	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kota Batam	Jumlah laporan hasil pelaksanaan sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	11 Laporan	74.140.000	Pemutakhiran Tahun 2023

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Kota Batam	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan atas pelanggaran Peraturan daerah dan peraturan Gubernur yang dapat ditangani sesuai SOP	17 Laporan	227.640.000	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kota Batam	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan atas pelanggaran Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah sesuai SOP	12 Laporan	233.256.000	Pemutakhiran Tahun 2023
Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Kota Batam	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan Bupati/Walikota	100 Laporan	634.423.380	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kota Batam	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	30 Laporan	419.550.000	Pemutakhiran Tahun 2023
<b>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil</b>	<b>Kota Batam</b>	<b>Rasio PPNS Satpol PP</b>	<b>6.31%</b>	<b>119.168.000</b>	<b>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil</b>	<b>Kota Batam</b>	<b>Rasio PPNS Satpol PP</b>		<b>119.168.000</b>	
Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Kota Batam	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	4 Laporan	119.168.000	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Kota Batam	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan peningkatan kapasitas pejabat PPNS penegak perda	3 Laporan	95.610.000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
Total				54.201.776.783	Total				54.201.776.783	

Pada review rancangan RKPD tahun 2024 ini dilakukan perubahan indikator sub kegiatan yang merupakan pemutakhiran di SIPD RI

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Salah satu tujuan sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Masyarakat dapat menyampaikan usulan program dan kegiatan kepada pemerintah melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) maupun secara langsung kepada Perangkat Daerah terkait.

Oleh karena itu Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam akan memperhatikan usulan program dan kegiatan yang disampaikan oleh masyarakat baik melalui Musrenbang maupun yang disampaikan langsung kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam.

Untuk sementara usulan program dan kegiatan dari masyarakat untuk Satuan Polisi Pamong Praja belum ada.

**Tabel 2.5**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan**  
**Tahun 2024**  
**Kota Batam**

Nama Perangkat Daerah: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, visi pembangunan nasional adalah "**Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur**". Visi pembangunan nasional tahun 2005–2025 itu mengarah pada pencapaian tujuan nasional, seperti tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemerintah menetapkan 8 (delapan) misi, yaitu:

- 1) Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila;
- 2) Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing;
- 3) Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum;
- 4) Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu;
- 5) Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan;
- 6) Mewujudkan Indonesia asri dan lestari;
- 7) Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
- 8) Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional.

Strategi untuk melaksanakan Visi dan Misi tersebut dijabarkan secara bertahap dalam periode lima tahunan atau RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional). Masing-masing tahap mempunyai skala prioritas dan strategi pembangunan yang merupakan kesinambungan dari skala prioritas dan strategi pembangunan pada periode-periode sebelumnya.

Tahapan skala prioritas utama dan strategi RPJMN secara ringkas adalah sebagai berikut:

- 1) RPJMN ke-1 (2005–2009) diarahkan untuk menata kembali dan membangun Indonesia di segala bidang yang ditujukan untuk menciptakan Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dan yang tingkat kesejahteraan rakyatnya meningkat.

- 2) RPJMN ke-2 (2010–2014) ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan iptek serta penguatan daya saing perekonomian.
- 3) RPJMN ke-3 (2015–2019) ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan iptek yang terus meningkat.
- 4) RPJMN ke-4 (2020–2024) ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Saat ini kita telah memasuki RPJMN ke-4 (2020-2024) yang merupakan periode ke-2 kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang kini berpasangan dengan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin setelah kembali terpilih pada Pemilu tanggal 17 April 2019 dan telah dilantik pada 20 Oktober 2019.

Visi Presiden dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Misi yang ditetapkan adalah:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, Pemerintah menetapkan 7 (tujuh) agenda pembangunan yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

7 (tujuh) agenda pembangunan yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 di atas tetap dipertahankan sebagai prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024 serta meletakkan fondasi yang kokoh menuju Indonesia Emas 2045.

RKP 2024 memiliki pedoman 8 Arah Kebijakan, yaitu:

1. Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan;
3. Penguatan Daya Saing Usaha;
4. Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan;
5. Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi;
6. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas;
7. Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara; dan
8. Pelaksanaan Pemilu 2024.

Adapun tema pembangunan RKP Tahun 2024 adalah adalah “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

### **3.2. Tujuan, dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Tujuan jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam adalah adalah “**Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum**”.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam adalah:

- a. Optimalnya kualitas layanan pendukung penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah;
- b. Menurunnya pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- c. Menurunnya pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Rincian tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kota  
Batam

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum		Persentase penurunan pelanggaran Ketertraman dan Keteriban Umum dan Peraturan Daerah dan Kepala Daerah	11,10%	12,50%	14,30%	16,70%	20%	25%
		1. Optimalnya kualitas layanan pendukung penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah	Indeks kepuasan terhadap layanan kesekretariatan	80	82	84	86	88	90
		2. Menurunnya pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	1. Persentase penurunan Pelanggaran Trantibum	11,10%	12,50%	14,30%	16,70%	20%	25%
		3. Menurunnya pelanggaran Perautran Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	2. Persentase penurunan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	11,10%	12,50%	14,30%	16,70%	20%	25%

### 3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan pada tahun 2024 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota
  - 1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah:
    - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
    - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
  - 2) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah:
    - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
  - 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah:
    - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
    - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
    - Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
    - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
    - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
    - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
  - 4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah:
    - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
    - Pengadaan Mebel;
    - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
  - 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:
    - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
  - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
- b. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 1) Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota:
- Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan;
  - Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa;
  - Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota;
  - Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum;
  - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia;
  - Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
  - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum;
  - Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
  - Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada;

- 2) Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota:
  - Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
  - Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
  - Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- 3) Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota
  - Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS.

Rencana Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2024 adalah berikut:

Tabel 3.3

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2024  
dan Prakiraan Maju Tahun 2025  
Kota Batam

Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	5				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				54.201.776.783				62.135.076.918
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam	100%	50.021.217.091	APBD		100%	57.740.254.574
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terpenuhi	Kota Batam	100%	29.220.868.111	APBD		100%	31.924.414.996

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Batam	189 orang /bulan	29.160.208.111	APBD		195 Orang/bulan	31.860.754.996
1	05	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Batam	324 Dokumen	60.660.000	APBD		300 Dokumen	63.660.000
1	05	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terlaksana</b>	<b>Kota Batam</b>	<b>100%</b>	<b>1.344.089.000</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>1.251.508.321</b>
1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Batam	2 Paket	1.344.089.000	APBD		2 Paket	1.251.508.321
1	05	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Batam</b>	<b>100%</b>	<b>760.099.000</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>620.510.533</b>
1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Batam	1 Paket	17.055.000	APBD		1Paket	7.699.461
1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Batam	7 Paket	256.006.000	APBD		7 Paket	142.228.551

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Batam	3 Paket	269.088.000	APBD		3 Paket	187.196.285
1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Batam	3 Paket	46.194.000	APBD		2 Paket	53.849.164
1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kota Batam	1 Dokumen	7.200.000	APBD		4 Dokumen	7.997.420
1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Batam	4 Laporan	164.556.000	APBD		4 Laporan	221.539.652
1	05	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpenuhi</b>	<b>Kota Batam</b>	<b>100%</b>	<b>744.905.000</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>1.602.991.257</b>
1	05	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kota Batam	-	-	APBD		2 Unit	806.916.830
1	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Batam	4 Paket	214.090.000	APBD		5 Paket	286.015.632

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Batam	68 Unit	530.815.000	APBD		6 Unit	510.058.795
1	05	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi</b>	<b>Kota Batam</b>	<b>100%</b>	<b>18.452.836.172</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>20.555.489.402</b>
1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Batam	37 Laporan	203.160.000	APBD		12 Laporan	243.921.322
1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Batam	72 Laporan	18.249.676.172	APBD		12 Laporan	20.311.568.080
1	05	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terlaksana</b>	<b>Kota Batam</b>	<b>100%</b>	<b>424.172.500</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>1.785.340.065</b>

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Batam	2 Unit	80.760.000	APBD		2 Unit	89.704.399
1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Batam	11 Unit	139.270.000	APBD		20 Unit	497.761.665
1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Batam	77 Unit	50.370.000	APBD		65 Unit	28.624.100
1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Batam	2 Unit	153.772.500	APBD		4 Unit	1.169.249.901
1	05	02			<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	1. Persentase Gangguan Trantibum yang Dapat Diselesaikan	Kota Batam	100%	3.254.607.000	APBD		100%	4.394.822.344
				2. Persentase Penegakan Perda dan Perkada		100%							

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						3. Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Terkena Dampak Gangguan Trantibum Akibat Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Perda dan Perkada		100%				100%	
1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase Pelanggaran dan Pengaduan Trantibum yang Ditangani	Kota Batam	100%	2.432.251.000	APBD		100%	3.269.775.573
				2. Persentase Satlinmas yang Terlatih dan Dikukuhkan		Kota Batam	100%				100%		
				3. Persentase Polisi Pamongpraja yang Memenuhi Standar Kualifikasi		Kota Batam	75%				87%		

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						4. Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Terkena Dampak Gangguan Trantibum Akibat Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Perda dan Perkada	Kota Batam	100%				100%	
						5. Persentase Jenis Sarpras Trantibum yang Terpenuhi Sesuai Kebutuhan	Kota Batam	100%				100%	
1	05	02	2.01	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Batam	-	0	APBD		1 Dokumen	53.690.682

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	05	02	2.01	0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kota Batam	5 Dokumen	194.252.000	APBD		1 Dokumen	148.618.847
1	05	02	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kota Batam	42 Orang	232.574.000	APBD		25 Orang	281.733.291
1	05	02	2.01	0006	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Kota Batam	-	0	APBD		1 Dokumen	53.690.682

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	05	02	2.01	0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	Kota Batam	-	0	APBD		10 Dokumen	60.000.000
1	05	02	2.01	0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kota Batam	100 Laporan	410.465.000	APBD		1 Laporan	163.939.128
1	05	02	2.01	0016	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Kota Batam	54 Laporan	1.202.750.000	APBD		1 Laporan	1.004.982.186

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	05	02	2.01	0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani.	Kota Batam	4 Laporan	50.000.000	APBD		1 Laporan	53.690.682
1	05	02	2.01	0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Kota Batam	9 Unit	342.210.000	APBD		15 Unit	1.449.397.075
1	05	02	2.02		<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>	<b>Persentase Pelanggaran Perda yang ditindaklanjuti</b>	<b>Kota Batam</b>	<b>100%</b>	<b>726.946.000</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>997.082.547</b>
1	05	02	2.02	0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Kota Batam	11 Laporan	74.140.000	APBD		12 Laporan	71.387.131
1	05	02	2.02	0011	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan	Kota Batam	12 Laporan	233.256.000	APBD		6 Laporan	244.442.937

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Kepala Daerah sesuai SOP							
1	05	02	2.02	0012	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	Kota Batam	30 Laporan	419.550.000	APBD		30 Laporan	681.252.479
1	05	02	2.03		<b>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota</b>	<b>Rasio PPNS Kota Batam</b>	<b>Kota Batam</b>	<b>6.31%</b>	<b>119.168.000</b>	<b>APBD</b>		<b>7.28%</b>	<b>127.964.224</b>
1	05	02	2.03	0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan peningkatan kapasitas pejabat PPNS penegak perda	Kota Batam	3 Laporan	95.610.000	APBD		3 Laporan	127.964.224
<b>Total</b>									<b>54.201.776.783</b>				<b>62.135.076.918</b>

- 3.3.1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam tahun 2024 antara lain:
- a. Pencapaian target pada rencana strategis (RENSTRA) satuan polisi pamong praja kota batam tahun 2021-2026.
  - b. Pencapaian SPM (standar pelayanan minimal) pada urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum, yang memiliki fungsi dalam penyelenggaraan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat di kota batam.
  - c. Menyesuaikan dengan perkiraan pagu anggaran satuan polisi pamong praja kota batam tahun anggaran 2024.
  - d. Permasalahan dan isu – isu strategis menyangkut situasi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat kota batam, seperti masih tingginya pelanggaran perda, unjuk rasa dan kerusuhan massa.

**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana kerja dan pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Rencana Kerja dan Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2024**

**Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

**Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target				
1					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>												
1	05				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>					<b>54.201.776.783</b>			<b>62,135,076,918</b>				
1	05	1			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>					<b>50.946.969.783</b>			<b>57,740,254,574</b>				
1	05	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>					<b>29.220.868.111</b>			<b>31,924,414,996</b>				
1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN		Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	100%	189 Orang/bulan		29.160.208.111	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		195 Orang/bulan	31.860.754.996

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	05	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	100%	324 Dokumen		60.660.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		300 dokumen	63.660.000	
1	05	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>						<b>1.344.089.000</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>1,251,508,321</b>				
1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	100%	2 Paket		1.344.089.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 paket	1,251,508,321	
1	05	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>						<b>760.099.000</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>620,510,533</b>				
1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	100%	1 Paket		17.055.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 paket	7,699,461 0	
1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	100%	7 Paket		256.006.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7 paket	142,228,551 0	
1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	100%	3 Paket		269.088.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 paket	187,196,285 0	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	100%	3 Paket		46.194.000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		2 paket	53,849,164 0	
1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	100%	1 Dokumen		7.200.000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		4 dokumen	7,997,420 0	
1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	100%	4 Laporan		164.556.000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		4 laporan	221,539,652 0	
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>01</b>	<b>2.07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>						<b>744.905.000</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>1,602,991,257</b>			
1	05	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	100%	Unit		0	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)			806,916,830 0	
1	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	100%	4 Paket		214.090.000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		5 paket	286,015,632	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	100%	68 Unit		530.815.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 unit	510,058,795	
1	05	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>18.452.836.172</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>20,555,489,402</b>				
1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	100%	37 Laporan		203.160.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	243,921,322	
1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	100%	72 Laporan		18.249.676.172	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	20,311,568,080	
1	05	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>424.172.500</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>1,785,340,065</b>				
1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	100%	2 Unit		80.760.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Unit	89,704,399	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	100%	11 Unit		139.270.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20 Unit	497,761,665	
1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	100%	77 Unit		50.370.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		65 Unit	28,624,100	
1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	100%	2 Unit		153.772.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Unit	1,169,249,901	
1	05	02			<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>							3.254.807.000	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>		4,394,822,344			
1	05	02	2.01		<b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>							2.432.251.000	<b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>		3,269,775,573			
1	05	02	2.01	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota		Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota		0 Dokumen		0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	53,690,682	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
						Kabupaten/Kota												
1	05	02	2.01	0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum		Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota		5 Dokumen		194.252.000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	148,681,847	
1	05	02	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia		Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya		Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota		42 Orang		232.574.000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		25 Orang	281,733,291	
1	05	02	2.01	0006	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan		Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota		0 Dokumen		0	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	53,690,682	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	05	02	2.01	0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat		Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan		Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota		0 Dokumen		0	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		10 Dokumen	60,000,000	
1	05	02	2.01	0015	Pencegahan Gangguan Ketertiban dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan		Jumlah Laporan Gangguan Ketertiban dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan		Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Laporan		410.465.000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	163,939,128	
1	05	02	2.01	0016	Penindakan atas Gangguan Ketertiban dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa		Jumlah Laporan Gangguan Ketertiban dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan		Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		54 Laporan		1.202.750.000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		30 Kasus	1,004,982,186	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	05	02	2.01	0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani		Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota		4 Laporan		50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	53,690,682	
1	05	02	2.01	0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia		Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota		9 Unit		342.210.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		15 Unit	1,449,367,075	
1	05	02	2.02		<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>							726.946.000	<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>		997,082,546			
1	05	02	2.02	0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah		Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		11 Laporan		74.140.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	71,387,131	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	05	02	2.02	0011	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Jumlah laporan pelaksanaan penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah sesuai SOP		Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Laporan		233.256.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 Laporan	244,442,937	
1	05	02	2.02	0012	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah		Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		30 Laporan		419.550.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		30 Laporan	681,252,479	
1	05	02	2.03		<b>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota</b>							<b>119.168.000</b>				<b>127,964,224</b>		
1	05	02	2.03	0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS		Jumlah Laporan Hasil pengembangan dan peningkatan kapasitas pejabat PPNS penegak perda		Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota		3 Laporan		95.610.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Laporan	127,964,224	
<b>TOTAL</b>												<b>54.201.776.783</b>				<b>62,135,076,918</b>		

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2024 ini merupakan dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan yang tertuang dalam Renstra dan RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026 yang selanjutnya dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang disingkat RKA Perangkat Daerah, yaitu dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Oleh karena itu pencapaian target kinerja yang tertuang dalam Renja Tahun 2024 ini sangat bergantung pada ketersediaan anggaran Pemerintah Kota Batam yang tertuang dalam APBD, sehingga apabila di kemudian hari terjadi defisit anggaran, maka akan dilakukan penyesuaian target kinerja dengan kemampuan anggaran yang ada.

Renja Tahun 2024 ini hendaknya menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sesuai dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 ini disusun untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan RKA Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024.